



ETIKA POLITIK DAN DEMOKRASI

Prof. R. Siti Zuhro, MA, PhD
(Peneliti Ahli Utama BRIN)
Jakarta, 16 September 2024

PENDAHULUAN

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Latin *ethicos*. *Ethicos* diambil dari kata *ethos* yang secara harfiah berarti kebiasaan, adat, sifat atau batas. Perilaku yang dianggap baik adalah di dalam batas atau berarti pula bahwa ada ketentuan.

Secara historis, jejak-jejak pertama kali munculnya penggunaan istilah etika itu terjadi di kalangan murid Pythagoras (570-496 SM). Murid-murid Pythagoras antara lain adalah Demokritos dan Sokrates. Pada masa Demokritos dan Sokrates pandangan-pandangan etis tentang perbuatan yang baik dan yang buruk dalam kehidupan mulai diperkenalkan secara lisan. Kedua filsuf tersebut hanya memberikan sistem pengajaran melalui dialog dan ceramah-ceramah secara umum.

Menurut **makna terminologis**, etika adalah cabang pohon filsafat yang berawal dengan pengajuan pertanyaan dasar mengenai moralitas, seperti: Apakah manusia *bebas*? Bagaimana manusia dapat menetapkan perbedaan antara baik dan buruk? Bagaimana etika *bisa nirmustahil*?

2

Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari perbuatan dan perilaku manusia dikaitkan dengan kualitas baik dan buruk. Etika dipahami sebagai ilmu tentang perbuatan susila yang benar. Dari etika diharapkan muncul pemikiran yang mendalam mengenai pertanyaan apa dan bagaimana saya seharusnya berbuat? Etika disebut pula sebagai filsafat moral karena mempelajari moralitas dari perbuatan manusia.

Etika biasanya berkaitan erat dengan kosa kata moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu "*mos*" dan dalam bentuk jamaknya "*mores*", yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari hal-hal/tindakan yang buruk.

Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

MASALAH MORALITAS

- Isu moralitas merupakan masalah mendasar di tubuh bangsa: adanya pelanggaran moral oleh kaum terdidik sekalipun.
- Banyak kaum terdidik terjerat masalah hukum, terutama tindak pidana korupsi.
- Hal ini disebabkan oleh minimnya penekanan nilai moral dalam proses pendidikan, sistem demokrasi dengan politik berbiaya tinggi (*high cost politic*), serta lemahnya pengawasan dan keteladanan.
- Hal-hal tersebut membuat banyak elit bangsa tidak menampilkan satu ucap dan laku. Antara ucapan dan tindakan tidak padu.

KEADABAN PUBLIK

- Kehidupan masyarakat dewasa ini dipenuhi oleh tiadanya keadaban publik. Masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang sopan santun, ramah tamah dan penuh keadaban sekarang ini sebagian terjebak ke dalam perilaku kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadaban lainnya.
- Hal ini ditandai dengan adanya persekusi oleh sekelompok orang terhadap lainnya, kriminalisasi lawan politik, pembegalan di jalan raya, dan bahkan ketakadaban menguasai ruang publik di media sosial dan ruang-ruang dialog televisi.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik

Dua harapan substantif:

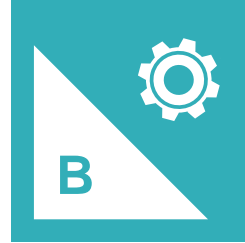
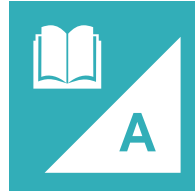
1. tersedianya lapisan penduduk yang dalam kadar tertentu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan berbasis profesionalisme maupun kompetensi.
2. terlahir warga bangsa yang memiliki kesadaran **berkeadaban** yang memadai bagi terciptanya masyarakat madani atau *civil society*.



- Diskusi politik tak pernah henti, kompetisi antar elite politik makin menjadi-jadi. Pemilu 2019, misalnya, berakhir dengan saling hujat-menghujat tiada henti, cerca mencerca yang bersifat pribadi dan hampa substansi makin menjadi-jadi.
- Nilai etika telah tercerabut dari akar budaya politik yang telah diajarkan oleh para guru bangsa.

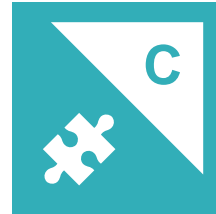
DISTORSI WACANA KEBANGSAAN

Pasca pemilu 2019 sangat terasa bangsa Indonesia sedang mengalami disharmorni.



Elemen-elemen bangsa seolah tak berdaya, larut dan terlibat dalam kondisi tersebut.

Bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara nyaris tanpa henti dihujani slogan-slogan dan diksi-diksi politik yang negatif, tidak etis dan sarkastik yang merugikan publik.



Makna pemilu cenderung disempitkan semata-mata untuk suksesi dan mempertahankan status quo saja. Pokoke menang, pokoke berkuasa menjadi jargon yang semakin diminati akhir-akhir ini.

Pentingnya Etika Politik dalam Berdemokrasi



Etika politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar nuansa politik lebih sehat dan rasional. Etika politik juga diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu/pilkada agar pemilu/pilkada tidak ternoda atau hasil pemilu tidak cacat secara hukum.



Pelanggaran terhadap etika politik dalam pemilu acapkali didorong oleh alasan tiadanya payung hukum yang bisa dijadikan rujukan dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia karena hukuman (penalty) yang tidak jelas.

Sistem yang ada juga acapkali disebut sebagai penyebab utamanya karena terkesan memberi peluang penyimpangan.

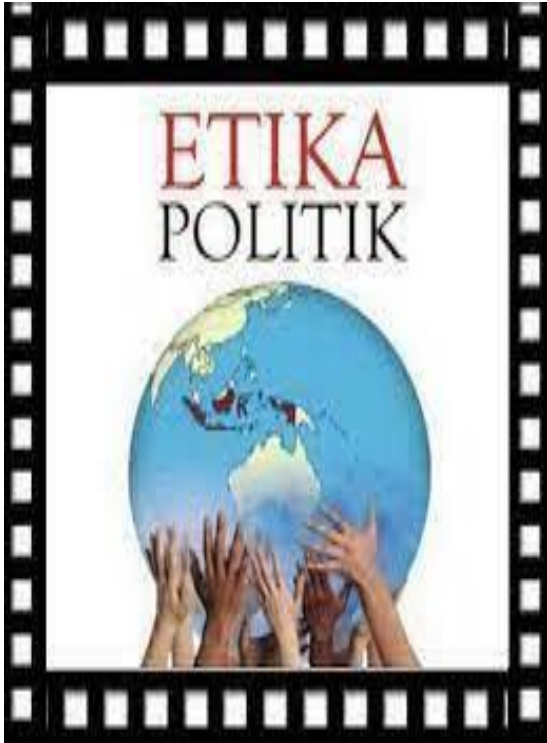
Etika politik terkait dengan moral politik. Sedangkan politik oleh para politisi hanya dimaknai sebagai “penyalur kepentingan” dan seni untuk “meraih kekuasaan” saja.

Moral politik mengandung makna yang sangat dalam dan terkait dengan nilai-nilai. Bila moral politik ini absen, yang akan muncul kemudian adalah politik menghalalkan semua cara.

Etika politik diperlukan untuk meredam kecenderungan politik menghalalkan semua cara tersebut.

Para elite, aktor dan tokoh seharusnya mampu merefleksikan nilai-nilai atau etika politik yang meneladani yang diharapkan berpengaruh positif terhadap pemilu yang jujur, adil dan bebas (langsung, umum, bebas, rahasia atau free and fair).

Pentingnya Etika Politik dalam Berdemokrasi



- Berdemokrasi dan berpolitik yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga pada kesadaran dan kepantasan moral yang mengedepankan etika nilai-nilai Pancasila.
- Bangsa Indonesia harus konsisten dalam mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam bentuk rasa malu dan siap mundur ketika dirinya melanggar etika/moral dan hukum.
- Budaya malu dan mundur ini sangat relevan, signifikan dan urgen diterapkan oleh Indonesia di saat negeri ini terpuruk oleh menipisnya etika/moral dan maraknya skandal korupsi.
- Demokrasi tidak boleh direduksi atau disimpangkan maknanya semata-mata hanya merebut kekuasaan saja.
- Kedaulatan harus tetap di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa dan/atau lembaga politik.

Aktor-aktor politik dan aktor informal berperan aktif dalam pembangunan nilai-nilai budaya dan dalam proses demokrasi.

Diperlukan sinergi, kooperasi dan komunikasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk mewujudkan penegakan etika/keadaban politik.

Kerjasama antar aktor dan elite untuk menggerakkan mesin demokrasi dan nilai-nilai budaya agar pemilu/pilkada berkualitas dan berdampak positif terhadap pemerintahan.

PERAN ELITE/AKTOR DAN TOKOH



Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan

Semakin besar penafian terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan yang kita miliki dan juga lemahnya penegakan hukum yang ada akan semakin distortif pula praktek demokrasi di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak efektifnya kinerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dilandasi Pancasila, praktik demokrasi perlu didorong untuk lebih beretika, berkualitas, sehat dan bermartabat.

Praktik demokrasi ala Indonesia yang didukung penuh oleh semua warga masyarakat. Yaitu suatu demokrasi yang mencerminkan perpaduan antara karakteristik dan kekhasan daerah-daerah (kedaerahan) dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan (keindonesiaan).



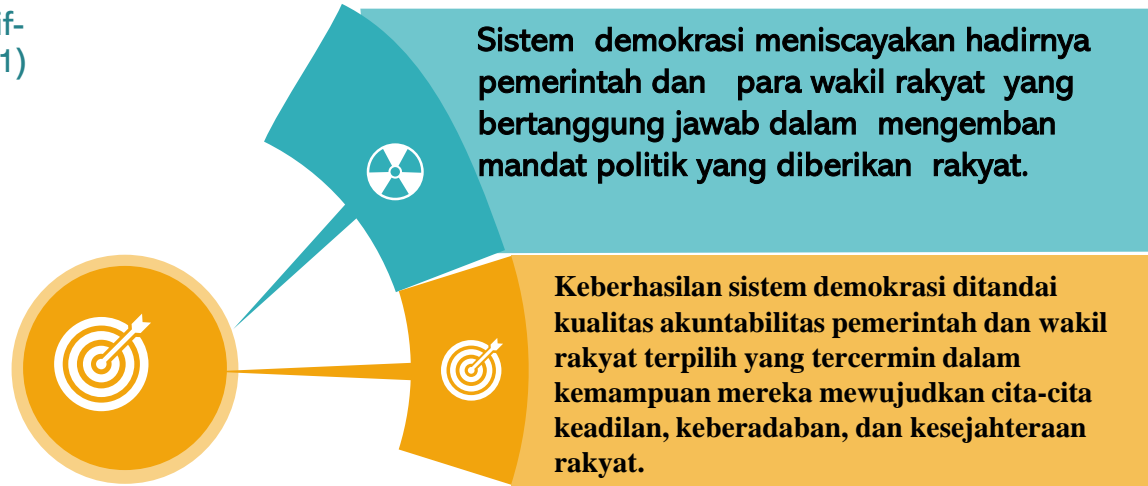
Demokrasi yang berkualitas tak semestinya menumbuhkan oligarki. Dengan menguatnya oligarki berarti demokrasi Indonesia tidak mengedepankan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Artinya, bukan rakyat yang diutamakan, melainkan para oligarkh.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Tolok ukur keberhasilan demokrasi yang substantif-berkualitas mengacu pada tiga hal penting yaitu (1) peningkatan kualitas *responsiveness* dan pertanggungjawaban (*accountability*) pemerintah kepada rakyat, (2) mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan (3) kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjalanan demokrasi Indonesia selama 1998-2024 masih jauh dari yang diharapkan.

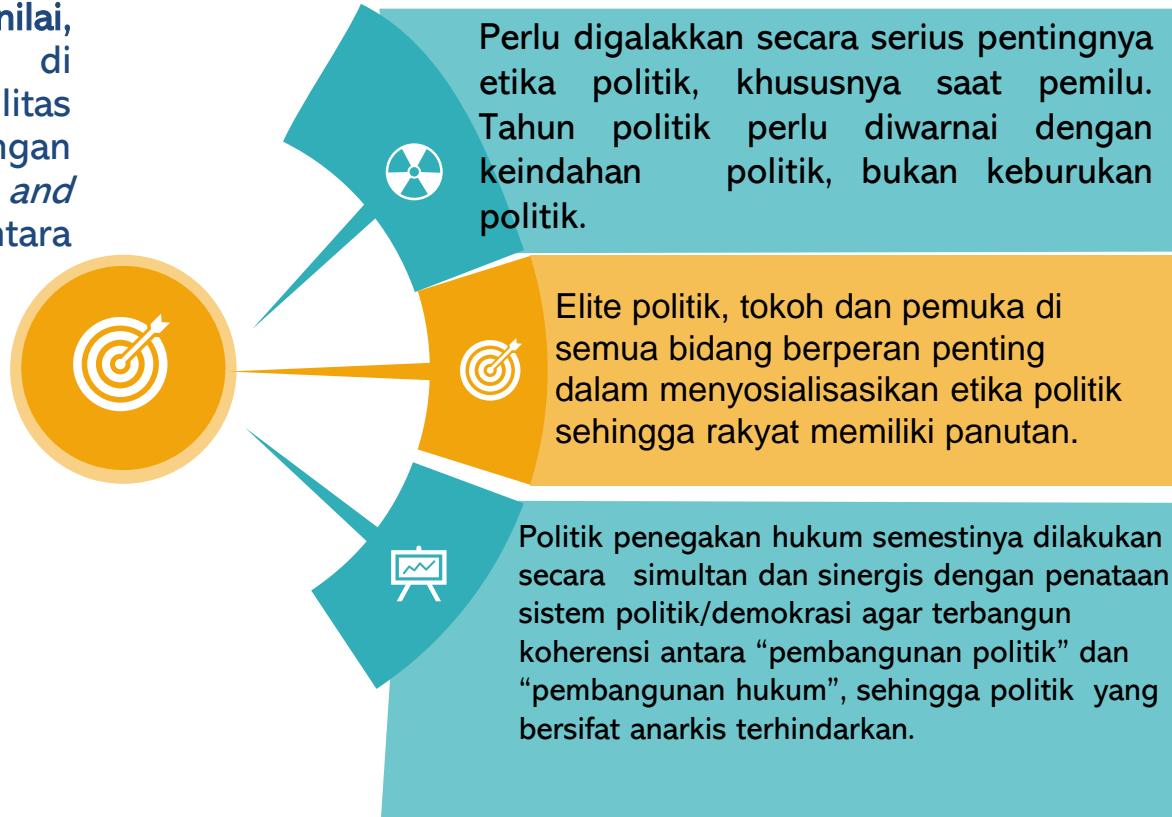
Demokrasi yang berlangsung selama ini baru di tataran menghasilkan silih bergantinya penguasa baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, tapi belum mampu menghadirkan **kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat** karena demokrasi di Indonesia masih **elitis** (baca prosedural) dan tersandera oleh kuatnya praktik **oligarki**.



2

Diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi seperti pengembangan **nilai, etika, dan keterampilan demokrasi** di kalangan warga, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kepentingan publik dan meningkatkan *checks and balances* dan rasionalitas politik di antara lembaga-lembaga demokrasi.

Diperlukan etika politik dalam berdemokrasi, dan secara khusus diperlukan etika politik para penyelenggara negara (pejabat publik) supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan publik.



DEMOKRASI

“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi saja tak cukup. Demokrasi memerlukan etika politik dan wawasan kebangsaan.

Praktek demokrasi yang tidak disertai nilai-nilai dan tidak dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang memadai akan membuat demokrasi tak membumi dan menghasilkan model demokrasi prosedural saja. Demokrasi akan sarat dengan distorsi ketika nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dinafikan dan dilupakan oleh para elite dan aktor politik serta masyarakat.” *(R. Siti Zuhro)*



*Terima kasih
Semoga Bermanfaat*